

ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN DAN BEBAN PROYEK BERDASARKAN PSAK 34 DALAM PENYESUAIAN PAJAK PADA PT. MANDIRI JAYA GRUP

Gusti Ayu Wulandri¹, Eri Triharyati², Indrawati Mara Kesuma³, Dheo Rimbano⁴

Universitas Bina Insan^{1,2,3,4}
wulandarygusti@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan pendapatan dan beban proyek berdasarkan PSAK No. 34 serta kaitannya dengan penyesuaian pajak pada PT Mandiri Jaya Grup periode 2022–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap data keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode persentase penyelesaian berdasarkan PSAK No. 34 menghasilkan tingkat penyelesaian proyek sebesar 60,88% pada tahun 2022, 53,00% pada tahun 2023, dan 59,87% pada tahun 2024. Berdasarkan tingkat penyelesaian tersebut, pendapatan yang diakui masing-masing sebesar Rp10.672.595.441,64, Rp8.748.744.316,80, dan Rp12.257.092.354,76, sedangkan beban yang diakui masing-masing sebesar Rp6.543.500.000,00, Rp5.764.000.000,00, dan Rp7.081.650.000,00. Dari sisi perpajakan, peningkatan nilai termin selama periode penelitian diikuti peningkatan PPN, PPh Pasal 23, dan PPh Final. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode persentase penyelesaian berdasarkan PSAK No. 34 dapat menghasilkan pengakuan pendapatan dan beban yang lebih proporsional terhadap tingkat penyelesaian proyek serta mendukung penyajian laporan keuangan yang lebih relevan dan wajar, sedangkan aspek perpajakan tetap perlu disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Beban Proyek, Pajak, Pengakuan Pendapatan, Persentase Penyelesaian

ABSTRACT

This study aims to analyze the recognition of project revenue and expenses based on PSAK No. 34 and its relationship with tax adjustments at PT Mandiri Jaya Grup during the 2022–2024 period. The research method used was qualitative research with a descriptive approach, while data were collected through observation, interviews, and documentation of the company's financial data. The results showed that the application of the percentage of completion method based on PSAK No. 34 resulted in project completion rates of 60.88% in 2022, 53.00% in 2023, and 59.87% in 2024. Based on these completion rates, recognized revenue amounted to IDR 10,672,595,441.64, IDR 8,748,744,316.80, and IDR 12,257,092,354.76, respectively, while recognized expenses amounted to IDR 6,543,500,000.00, IDR 5,764,000,000.00, and IDR 7,081,650,000.00, respectively. From the taxation perspective, the increase in project payment terms during the study period was followed by increases in VAT, Article 23 Income Tax, and Final Income Tax liabilities. The study concludes that the application of the percentage of completion method based on PSAK No. 34 provides a more proportional basis for recognizing project revenue and expenses according to the level of project completion and supports the presentation of more relevant and fairly stated financial information, while tax treatment should remain aligned with applicable tax regulations.

Keywords: Project Expenses Taxation, Revenue Recognition, Percentage of Completion

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran

kinerja keuangan suatu perusahaan Menurut Munawair, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan bersangkutan, dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna (*user*) untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial (Hanafi & Halim, 2022). Tujuan laporan keuangan yang disusun menurut standar akuntansi keuangan (SAK) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh para pemakai laporan keuangan yaitu meliputi pihak manajemen, investor, calon investor, karyawan, kreditor pelanggan pemasok, pemerintah dan masyarakat. Sementara laporan keuangan fiskal ditujukan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang akan disetor perusahaan kepada pemerintah, sebagai sumber penerimaan Negara yang berasal dari pajak. Untuk tujuan ini laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang perpajakan (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2021).

Pengakuan pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian (*percentage of completion*). Pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban dan laba yang dilaporkan dapat distribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai luas aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu periode (Asiva Noor Rachmayani, 2021). Beban merupakan pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan (Rahmi, 2021). Pajak merupakan suatu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan baik di pemerintah pusat maupun tingkat daerah yang sudah diatur Undang-Undang Pajak diperoleh dari pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara yang tujuannya untuk mengelola pemerintah dan masyarakat umum. Manfaat pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat, dikarenakan pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi (Mohammad Taufik, MH, 2021).



Grafik 1. Laporan Laba/ Rugi Perusahaan Periode 2022-2024

Sumber Data: Laporan Keuangan PT Mandiri Jaya Grup Periode Tahun 2022-2024

Laporan Keuangan PT. Mandiri Jaya Grup yang terdiri dari laporan pendapatan, beban dan pajak. Pada tahun 2022 yaitu pendapatan sebesar Rp17.530.200.000, beban sebesar Rp10.747.982.000 dan pajak sebesar Rp797.855.000. Pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan yang dimana pendapatan mengalami penurunan sebesar

Rp16.508.410.000, beban juga terdapat penurunan sebesar Rp10.876.358.000 sedangkan pajaknya terdapat pengurangan sebesar Rp661.952.000 dan Pada tahun 2024 terjadi kenaikan kembali yang dimana pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp20.472.310.000, beban mengalami penurunan sebesar Rp11.828.069.000 serta pajak mengalami peningkatan sebesar Rp1.016.488.000.

Permasalahan yang dihadapi oleh PT. Mandiri Jaya Grup adalah dimana pendapatan, beban dan pajak perusahaan yang mengalami fluktuatif dari tahun 2022, 2023 dan 2024 yang mengacu pada perubahan harga pasar atau nilai yang tidak menentu. Pada tahun 2022 PT. Mandiri Jaya Grup mendapatkan nilai proyek yang stabil, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan yang signifikan dari nilai proyek yang didapat tidak memenuhi ekspektasi karena terdapat persaingan yang menjamur usaha yang serupa sehingga perusahaan harus berusaha dengan maksimal untuk mendapatkan nilai proyek. Serta pada tahun 2024 perusahaan dapat menaikkan nilai proyek dengan pendapatan, beban pajak yang maksimal. Pencatatan Pengakuan Pendapatan dan Beban PT. Mandiri Jaya Grup, pengakuan pendapatan diakui berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan (*persentase of completion*) dan bebannya diakui pada saat terjadinya dan terkait kontrak (*matching principle*). Jadi pengakuan pendapatan dan beban PT. Mandiri Jaya Grup adalah *accrual basis* dimana barang telah diserahkan kepada pelanggan atau jasa telah selesai diberikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian PSAK 34

PSAK No. 34 merupakan standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dan biaya yang timbul dari kontrak konstruksi. Tujuan utama PSAK No. 34 adalah menentukan kapan pendapatan dan biaya kontrak diakui dalam laporan keuangan sehingga mencerminkan tingkat penyelesaian pekerjaan secara andal (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2021). PSAK No. 34 merupakan standar yang secara khusus mengatur pengakuan pendapatan, biaya kontrak, metode pengukuran tingkat penyelesaian, perubahan estimasi, hingga pengungkapan yang berkaitan dengan kontrak konstruksi. Standar ini bertujuan agar laporan keuangan menyajikan informasi yang wajar mengenai kinerja perusahaan konstruksi (Martani, D., Siregar et al., 2022). Metode pengakuan pendapatan yaitu metode persentase penyelesaian merupakan metode yang pendapatan dan laba kotor diakui pada setiap periode, didasarkan atas kemajuan dalam pembangunan, yaitu persentase dari penyelesaian dan metode kontrak selesai adalah metode yang pendapatan dan laba kotor diakui hanya pada waktu kontrak diselesaikan (Neneng et al., 2020). Menurut PSAK 34 (kontrak konstruksi), apabila hasil kontrak dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan diakui berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan pada akhir periode pelaporan (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2021).

- a. Menghitung persentase penyelesaian

$$\text{Persentase Penyelesaian} = \frac{\text{Biaya Kontrak yang telah terjadi}}{\text{Estimasi Total Biaya Kontrak}} \times 100\%$$

- b. Menghitung pendapatan yang diakui
Pendapatan yang diakui = Persentase Penyelesaian x Nilai Kontrak
- c. Menghitung beban yang diakui
Beban yang diakui = Biaya Kontrak yang telah terjadi
- d. Menghitung laba kotor yang diakui
Laba kotor = Pendapatan yang diakui – Beban yang diakui

Pengakuan Pendapatan

Arus kas masuk atau perangkat lainnya atas aktiva sebuah entitas atau pelunasan kewajiban selama satu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan (Ummah, 2022). Peningkatan jumlah aktiva atau menurunnya kewajiban suatu badan usaha yang timbul dari penyerahan barang dagang/jasa atau aktivitas usaha lainnya didalam suatu periode. Tidak termasuk dalam pengertian pendapatan adalah peningkatan aktiva perusahaan yang berasal dari pembelian harta, investasi oleh pemilik, pinjaman atau koreksi rugi laba periode tahun sebelumnya (Suhardi et al., 2023). Sebagai keuntungan ekonomi yang dihasilkan suatu entitas selama periode akuntansi yang menunjukkan arus kas masuk atau naiknya aset, penurunan kewajiban yang harus dibayarkan, yang berdampak pada naiknya jumlah modal. Keuntungan ekonomi tersebut juga dihasilkan dari berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh entitas seperti penjualan, komisi, bunga, dividen, royalti dan sewa (Ananda, 2023). Ayat jurnal dibuat perusahaan untuk mencatat transaksi penerimaan uang muka adalah sebagai berikut (Ari, 2021):

Kas	Rp. xxx	
PPh		Rp. xxx
Pendapatan diterima dimuka	Rp. xxx	
PPh		Rp. xxx

Beban

Pengertian beban tidak dapat dipisahkan dengan biaya (cost) dan rugi (loss) Dalam Accounting Principles Board dijelaskan bahwa biaya yang timbul hanya dalam kaitannya dengan kegiatan penciptaan laba yang mengakibatkan perubahan ekuitas Pengiriman barang dalam transaksi penjualan merupakan biaya karena hasil bersih penjualan tersebut adalah perubahan ekuitas (Kalsum et al., 2022). Pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan (Rahmi, 2021). Jurnal koreksi yang harus dibuat oleh perusahaan atas kesalahan pencatatan beban adalah sebagai berikut (Ari, 2021).

Pekerjaan dalam pelaksanaan	Rp. xxx	
Biaya Kontrak		Rp. xxx
Beban penyusutan		Rp. xxx

Pajak

Suatu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik di pemerintah pusat maupun tingkat daerah yang sudah diatur undang-undang. Pajak diperoleh dari pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara yang tujuannya untuk mengelola pemerintah dan masyarakat umum Manfaat pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat, dikarenakan pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi (Mohammad Taufik, MH, 2021). Pembayaran yang tidak secara langsung berhubungan dengan barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat dan badan/organisasi yang berada di dalam jangkauan pemerintah (Andaki et al., 2021). Suatu manfaat yang dibebankan oleh negara secara sepihak (menurut standar yang berlaku umum) kepada warga negara atau badan usaha atas penghasilan kena pajaknya, tanpa dipungut biaya, serta hanya dipergunakan untuk menutup pengeluaran umum Negara (Rizki et al., 2022).

Dasar Pengenaan Pajak = Termin x 100/110

- 1) PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak
- 2) PPh = 2 % x Dasar Pengenaan Pajak

- 3) PPH Final = 2 % (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha kecil (Isroah, 2022).

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan teori yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang diamati. Lalu diarahkan ke latar belakang masalah penelitian secara utuh tanpa mengisolasi individu atau pihak perusahaan (Sugiyono, 2022). Metode penelitian ini untuk mendapatkan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan teori. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada objek yang diteliti. Peneliti akan memberikan pandangan subjektifnya terhadap fokus penelitian. Dengan kata lain, dari semua data yang peneliti kumpulkan peneliti akan menyusun kesimpulan berdasarkan perspektif pribadinya. Oleh sebab itu, saat akan melakukan penelitian kualitatif peneliti harus divalidasi. Karena Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses sistematis dalam mengolah, menyederhanakan, dan menafsirkan kumpulan data mentah menjadi informasi yang bermakna. Dalam penelitian ini, tahapan ini sangat penting untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hasil penelitian, yang pada akhirnya digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian. Pengakuan Pendapatan dan Beban Berdasarkan PSAK 34 dengan menggunakan Metode Persentase Penyelesaian (*Percentage Of Completion Method*). Menurut PSAK 34 (kontrak konstruksi), apabila hasil kontrak dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan diakui berdasarkan tingkat penyelesaian pekerjaan pada akhir periode pelaporan (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2021).

Tab 1.
Pengakuan Pendapatan dan Beban Berdasarkan PSAK 34 dengan menggunakan Metode Persentase Penyelesaian (Percentage Of Completion Method) Tahun 2022-2024

Tahun	2022	2023	2024
Nilai Kontrak	Rp 17.530.200.000,00	Rp 16.508.410.000,00	Rp 20.472.310.000,00
Estimasi Total Biaya	Rp 10.747.982.000,00	Rp 10.876.358.000,00	Rp 11.828.069.000,00
Biaya Yang Terjadi	Rp 6.543.500.000,00	Rp 5.764.000.000,00	Rp 7.081.650.000,00
Persentase Penyelesaian	60,88%	53,00%	59,87%
Pendapatan Yang Diakui	Rp 10.672.595.441,64	Rp 8.748.744.316,80	Rp 12.257.092.354,76
Beban Yang diakui	Rp 6.543.500.000,00	Rp 5.764.000.000,00	Rp 7.081.650.000,00
Laba Kotor	Rp 4.129.095.441,64	Rp 2.984.744.316,80	Rp 5.175.442.354,76

Ayat jurnal dibuat PT Mandiri Jaya Grup tahun 2022 untuk mencatat Pengakuan Pendapatan dan Beban Berdasarkan PSAK 34 dengan menggunakan Metode Persentase Penyelesaian (*Percentage Of Completion Method*) adalah sebagai berikut:

1. Menghitung persentase penyelesaian

Persentase penyelesaian dihitung dengan membandingkan biaya yang telah terjadi sampai akhir periode dengan estimasi total biaya kontrak.

Rp6.543.500.000,00

$$\text{Persentase Penyelesaian} = \frac{\text{Rp10.747.982.000,00}}{\text{Rp10.747.982.000,00}} \times 100\% = 60,88 \%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2022 proyek telah diselesaikan sebesar 60,88% dari keseluruhan pekerjaan berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan.

2. Menghitung pendapatan yang diakui

Pendapatan yang diakui dihitung dengan mengalikan persentase penyelesaian dengan nilai kontrak yang telah disepakati.

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan yang diakui} &= 60,88\% \times \text{Rp17.530.200.000,00} \\ &= \text{Rp10.672.595.441,64} \end{aligned}$$

Artinya, sesuai PSAK No. 34, perusahaan seharusnya mengakui pendapatan sebesar Rp10.672.595.441,64 pada tahun 2022 karena nilai tersebut mencerminkan bagian pekerjaan yang telah diselesaikan selama periode berjalan.

3. Menghitung beban yang diakui

Beban yang diakui merupakan biaya kontrak yang telah benar-benar terjadi selama pelaksanaan proyek hingga akhir periode pelaporan.

$$\text{Beban yang diakui} = \text{Rp6.543.500.000,00}$$

Dengan demikian, beban yang diakui pada tahun 2022 adalah sebesar Rp6.543.500.000,00.

4. Menghitung laba kotor yang diakui

Laba kotor dihitung sebagai selisih antara pendapatan yang diakui dengan beban yang diakui.

$$\begin{aligned} \text{Laba kotor} &= \text{Rp 10.672.595.441,64} - \text{Rp6.543.500.000,00} \\ &= \text{Rp4.129.095.441,64} \end{aligned}$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa laba kotor yang dapat diakui perusahaan pada tahun 2022 sebesar Rp4.129.095.441,64.

Berdasarkan perhitungan di atas, penerapan PSAK No. 34 menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan kontrak konstruksi dilakukan berdasarkan tingkat penyelesaian proyek, yaitu sebesar 60,88%. Dengan tingkat penyelesaian tersebut, perusahaan seharusnya mengakui pendapatan sebesar Rp10.672.595.441,64, beban sebesar Rp6.543.500.000,00, dan laba kotor sebesar Rp4.129.095.441,64. Metode ini menghasilkan pengakuan pendapatan yang lebih mencerminkan kemajuan pekerjaan dibandingkan apabila seluruh pendapatan diakui pada saat proyek selesai, sehingga penyajian laporan keuangan menjadi lebih wajar dan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 34. Ayat jurnal dibuat PT Mandiri Jaya Grup tahun 2023 untuk mencatat Pengakuan Pendapatan dan Beban berdasarkan PSAK 34 dengan menggunakan Metode Persentase Penyelesaian (*Percentage Of Completion Method*) adalah sebagai berikut:

1. Menghitung persentase penyelesaian

Persentase penyelesaian dihitung dengan membandingkan biaya yang telah terjadi sampai akhir periode dengan estimasi total biaya kontrak.

$$\begin{aligned} \text{Persentase Penyelesaian} &= \frac{\text{Rp5.764.000.000,00}}{\text{Rp10.876.358.000,00}} \times 100\% \\ &= 53,00 \% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2023 proyek telah diselesaikan sebesar 53,00% dari keseluruhan pekerjaan berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan.

2. Menghitung pendapatan yang diakui

Pendapatan yang diakui dihitung dengan mengalikan persentase penyelesaian dengan nilai kontrak yang telah disepakati.

$$\begin{aligned}\text{Pendapatan yang diakui} &= 53,00\% \times \text{Rp}16.508.410.000,00 \\ &= \text{Rp}8.748.744.316,80\end{aligned}$$

Artinya, sesuai PSAK No. 34, perusahaan seharusnya mengakui pendapatan sebesar Rp8.748.744.316,80 pada tahun 2023 karena nilai tersebut mencerminkan bagian pekerjaan yang telah diselesaikan selama periode berjalan.

3. Menghitung beban yang diakui

Beban yang diakui merupakan biaya kontrak yang telah benar-benar terjadi selama pelaksanaan proyek hingga akhir periode pelaporan.

$$\text{Beban yang diakui} = \text{Rp}5.764.000.000,00$$

Dengan demikian, beban yang diakui pada tahun 2023 adalah sebesar Rp5.764.000.000,00.

4. Menghitung laba kotor yang diakui

Laba kotor dihitung sebagai selisih antara pendapatan yang diakui dengan beban yang diakui.

$$\begin{aligned}\text{Laba kotor} &= \text{Rp}8.748.744.316,80 - \text{Rp}5.764.000.000,00 \\ &= \text{Rp}2.984.744.316,80\end{aligned}$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa laba kotor yang dapat diakui perusahaan pada tahun 2023 sebesar Rp2.984.744.316,80.

Berdasarkan perhitungan di atas, penerapan PSAK No. 34 menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan kontrak konstruksi dilakukan berdasarkan tingkat penyelesaian proyek, yaitu sebesar 53,00%. Dengan tingkat penyelesaian tersebut, perusahaan seharusnya mengakui pendapatan sebesar Rp8.748.744.316,80, beban sebesar Rp5.764.000.000,00, dan laba kotor sebesar Rp2.984.744.316,80. Metode ini menghasilkan pengakuan pendapatan yang lebih mencerminkan kemajuan pekerjaan dibandingkan apabila seluruh pendapatan diakui pada saat proyek selesai, sehingga penyajian laporan keuangan menjadi lebih wajar dan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 34. Ayat jurnal dibuat PT Mandiri Jaya Grup tahun 2024 untuk mencatat Pengakuan Pendapatan dan Beban berdasarkan PSAK 34 dengan menggunakan Metode Persentase Penyelesaian (*Percentage Of Completion Method*) adalah sebagai berikut:

1. Menghitung persentase penyelesaian

Persentase penyelesaian dihitung dengan membandingkan biaya yang telah terjadi sampai akhir periode dengan estimasi total biaya kontrak.

$$\begin{aligned}\text{Persentase Penyelesaian} &= \frac{\text{Rp}7.81.650.000,00}{\text{Rp}11.828.069.000,00} \times 100\% \\ &= 59,87\%\end{aligned}$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2024 proyek telah diselesaikan sebesar 59,87% dari keseluruhan pekerjaan berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan.

2. Menghitung pendapatan yang diakui

Pendapatan yang diakui dihitung dengan mengalikan persentase penyelesaian dengan nilai kontrak yang telah disepakati.

$$\begin{aligned}\text{Pendapatan yang diakui} &= 59,87\% \times \text{Rp}20.472.310.000,00 \\ &= \text{Rp}12.257.092.354,76\end{aligned}$$

Artinya, sesuai PSAK No. 34, perusahaan seharusnya mengakui pendapatan sebesar Rp12.257.092.354,76 pada tahun 2023 karena nilai tersebut mencerminkan bagian pekerjaan yang telah diselesaikan selama periode berjalan.

3. Menghitung beban yang diakui

Beban yang diakui merupakan biaya kontrak yang telah benar-benar terjadi selama pelaksanaan proyek hingga akhir periode pelaporan.

Beban yang diakui = Rp7.81.650.000,00

Dengan demikian, beban yang diakui pada tahun 2024 adalah sebesar Rp7.81.650.000,00.

4. Menghitung laba kotor yang diakui

Laba kotor dihitung sebagai selisih antara pendapatan yang diakui dengan beban yang diakui.

Laba kotor = Rp12.257.092.354,76 – Rp7.81.650.000,00

= Rp5.175.442.354,76

Hasil tersebut menunjukkan bahwa laba kotor yang dapat diakui perusahaan pada tahun 2024 sebesar Rp5.175.442.354,76.

Berdasarkan perhitungan di atas, penerapan PSAK No. 34 menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan kontrak konstruksi dilakukan berdasarkan tingkat penyelesaian proyek, yaitu sebesar 59,87%. Dengan tingkat penyelesaian tersebut, perusahaan seharusnya mengakui pendapatan sebesar Rp12.257.092.354,76, beban sebesar Rp7.81.650.000,00, dan laba kotor sebesar Rp5.175.442.354,76. Metode ini menghasilkan pengakuan pendapatan yang lebih mencerminkan kemajuan pekerjaan dibandingkan apabila seluruh pendapatan diakui pada saat proyek selesai, sehingga penyajian laporan keuangan menjadi lebih wajar dan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 34.

Pengakuan Pendapatan

Berdasarkan PSAK No. 34 mengenai Akuntansi Kontrak Konstruksi diatur mengenai syarat pengakuan dan pencatatan pendapatan biaya kontrak untuk pekerjaan kontrak konstruksi yaitu bila hasil (*outcome*) kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi harus diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal neraca (*percentage of completion*) (Ari, 2021). Ayat jurnal dibuat PT Mandiri Jaya Grup tahun 2022 untuk mencatat transaksi penerimaan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Usaha	Rp17.530.200.000,00
PPh	Rp797.855.000,00
Pendapatan diterima dimuka	Rp17.530.200.000,00
PPh	Rp797.855.000,00

Ayat jurnal yang dibuat oleh PT Mandiri Jaya Grup pada tahun 2022 untuk mencatat transaksi penerimaan dilakukan dengan mendebit akun Kas/Bank sebesar Rp17.530.200.000,00 sebagai jumlah penerimaan yang diperoleh perusahaan dan akun PPh sebesar Rp797.855.000,00 sebagai pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan dan dapat dikreditkan oleh perusahaan, sedangkan pada sisi kredit dicatat akun Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp17.530.200.000,00 karena pembayaran telah diterima sebelum seluruh kewajiban jasa atau pekerjaan diselesaikan, serta akun PPh Keluaran sebesar Rp797.855.000,00 sebagai kewajiban perusahaan atas pajak penghasilan yang dipungut dari pelanggan dan harus disetorkan kepada negara. Ayat jurnal dibuat PT Mandiri Jaya Grup tahun 2023 untuk mencatat transaksi penerimaan adalah sebagai berikut.

Pendapatan Usaha	Rp16.508.410.000,00
PPh	Rp661.952.000,00

Pendapatan diterima dimuka	Rp16.508.410.000,00
PPh	Rp661.952.000,00

Ayat jurnal yang dibuat oleh PT Mandiri Jaya Grup pada tahun 2023 untuk mencatat transaksi penerimaan dilakukan dengan mendebit akun Kas/Bank sebesar Rp16.508.410.000,00 sebagai jumlah penerimaan yang diterima perusahaan dan akun PPh sebesar Rp661.952.000,00 sebagai pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan dan dapat dikreditkan pada saat pelaporan pajak, sedangkan pada sisi kredit dicatat akun Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp16.508.410.000,00 karena perusahaan telah menerima pembayaran sebelum seluruh jasa atau pekerjaan diselesaikan, serta akun PPh sebesar Rp661.952.000,00 sebagai kewajiban pajak penghasilan yang dipungut dari pelanggan dan harus disetorkan kepada negara. Ayat jurnal dibuat PT Mandiri Jaya Grup tahun 2024 untuk mencatat transaksi penerimaan adalah sebagai berikut.

Pendapatan Usaha	Rp20.472.310.000,00
PPh	Rp1.016.488.000,00
Pendapatan diterima dimuka	Rp20.472.310.000,00
PPh	Rp1.016.488.000,00

Ayat jurnal yang dibuat oleh PT Mandiri Jaya Grup pada tahun 2024 untuk mencatat transaksi penerimaan dilakukan dengan mendebit akun Kas/Bank sebesar Rp20.472.310.000,00 sebagai jumlah penerimaan yang diterima perusahaan dan akun PPh sebesar Rp1.016.488.000,00 sebagai pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan dan dapat dikreditkan oleh perusahaan, sedangkan pada sisi kredit dicatat akun Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp20.472.310.000,00 karena perusahaan telah menerima pembayaran sebelum seluruh jasa atau pekerjaan diselesaikan, serta akun PPh sebesar Rp1.016.488.000,00 sebagai kewajiban pajak penghasilan yang dipungut dari pelanggan dan harus disetorkan kepada negara.

Beban Proyek

Berdasarkan PSAK No. 34 mengenai Akuntansi Kontrak Konstruksi diatur mengenai syarat pengakuan dan pencatatan pendapatan biaya kontrak untuk pekerjaan kontrak konstruksi yaitu bila hasil (*outcome*) kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi harus diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian akuvitas kontrak pada tanggal neraca (*percentage of completion*) (Ari, 2021). Jurnal koreksi yang harus dibuat oleh perusahaan atas kesalahan pencatatan beban tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Pekerjaan dalam pelaksanaan	Rp17.530.200.000,00
Biaya Kontrak	Rp10.747.982.000,00
Beban penyusutan	Rp138.500.000,00

Jurnal koreksi yang harus dibuat oleh PT Mandiri Jaya Grup atas kesalahan pencatatan beban tahun 2022 dilakukan dengan mendebit akun Pekerjaan dalam Pelaksanaan sebesar Rp17.530.200.000,00 sebagai pengakuan atas nilai pekerjaan proyek yang masih berada dalam proses penyelesaian dan belum dapat diakui seluruhnya sebagai beban pada periode berjalan, sedangkan pada sisi kredit dicatat akun Biaya Kontrak sebesar Rp10.747.982.000,00 dan akun Beban Penyusutan sebesar Rp138.500.000,00 untuk memperbaiki kesalahan pencatatan yang sebelumnya mengakibatkan beban perusahaan dicatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga melalui jurnal koreksi tersebut

perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat, wajar, dan sesuai dengan prinsip akuntansi serta mencerminkan nilai aset dan beban yang sebenarnya terjadi pada periode tahun 2022. Jurnal koreksi yang harus dibuat oleh perusahaan atas kesalahan pencatatan beban tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Pekerjaan dalam pelaksanaan	Rp16.508.410.000,00
Biaya Kontrak	Rp10.876.358.000,00
Beban penyusutan	Rp205.000.000,00

Jurnal koreksi yang harus dibuat oleh PT Mandiri Jaya Grup atas kesalahan pencatatan beban tahun 2023 dilakukan dengan mendebit akun Pekerjaan dalam Pelaksanaan sebesar Rp16.508.410.000,00 sebagai pengakuan atas nilai pekerjaan proyek yang masih dalam proses penyelesaian dan belum sepenuhnya dapat diakui sebagai beban pada periode berjalan, sedangkan pada sisi kredit dicatat akun Biaya Kontrak sebesar Rp10.876.358.000,00 dan akun Beban Penyusutan sebesar Rp205.000.000,00 untuk memperbaiki kesalahan pencatatan beban yang sebelumnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga jurnal koreksi tersebut bertujuan agar laporan keuangan perusahaan dapat disajikan secara lebih akurat, wajar, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku serta mampu mencerminkan nilai aset, biaya, dan hasil usaha perusahaan yang sebenarnya pada tahun 2023. Jurnal koreksi yang harus dibuat oleh perusahaan atas kesalahan pencatatan beban tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Pekerjaan dalam pelaksanaan	Rp20.472.310.000,00
Biaya Kontrak	Rp11.828.069.000,00
Beban penyusutan	Rp285.800.000,00

Jurnal koreksi yang harus dibuat oleh PT Mandiri Jaya Grup atas kesalahan pencatatan beban tahun 2024 dilakukan dengan mendebit akun Pekerjaan dalam Pelaksanaan sebesar Rp20.472.310.000,00 sebagai pengakuan atas nilai pekerjaan proyek yang masih berada dalam proses penyelesaian dan belum sepenuhnya dapat diakui sebagai beban pada periode berjalan, sedangkan pada sisi kredit dicatat akun Biaya Kontrak sebesar Rp11.828.069.000,00 dan akun Beban Penyusutan sebesar Rp285.800.000,00 untuk memperbaiki kesalahan pencatatan beban yang sebelumnya menyebabkan pengakuan biaya perusahaan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga melalui jurnal koreksi tersebut laporan keuangan perusahaan dapat disajikan secara lebih akurat, wajar, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku serta mampu mencerminkan nilai aset, biaya, dan kinerja perusahaan yang sebenarnya pada tahun 2024.

Tabel 2.
Perhitungan Laporan Pajak

Tahun	Termin Pajak	PPN	PPh 23	PPh Final
2022	Rp10.747.982.000,00	Rp977.089.273,00	Rp195.417.855,00	Rp214.959.640,00
2023	Rp10.876.358.000,00	Rp988.759.818,00	Rp197.751.964,00	Rp217.527.160,00
2024	Rp11.828.069.000,00	Rp1.075.279.000,00	Rp215.055.800,00	Rp236.561.380,00

Berdasarkan Tabel 2 tentang perhitungan laporan pajak PT Mandiri Jaya Grup, dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 perusahaan memiliki termin pajak sebesar Rp10.747.982.000,00 dengan kewajiban PPN sebesar Rp977.089.273,00, PPh Pasal 23 sebesar Rp195.417.855,00, dan PPh Final sebesar Rp214.959.640,00, kemudian pada tahun

2023 termin pajak mengalami peningkatan menjadi Rp10.876.358.000,00 dengan PPN sebesar Rp988.759.818,00, PPh Pasal 23 sebesar Rp197.751.964,00, dan PPh Final sebesar Rp217.527.160,00, sedangkan pada tahun 2024 termin pajak kembali meningkat menjadi Rp11.828.069.000,00 dengan kewajiban PPN sebesar Rp1.075.279.000,00, PPh Pasal 23 sebesar Rp215.055.800,00, dan PPh Final sebesar Rp236.561.380,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan termin pajak setiap tahun turut menyebabkan meningkatnya kewajiban perpajakan perusahaan, baik dari sisi PPN, PPh Pasal 23, maupun PPh Final.

Pengakuan Pendapatan dan Beban Berdasarkan PSAK 34 dengan menggunakan Metode Persentase Penyelesaian (*Percentage Of Completion Method*)

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan metode persentase penyelesaian menghasilkan pengakuan pendapatan yang lebih mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan dibandingkan metode yang mengakui pendapatan pada saat proyek selesai (*completed contract method*). Apabila perusahaan hanya mengakui pendapatan pada saat proyek selesai, maka selama masa pelaksanaan proyek laporan laba rugi tidak akan mencerminkan hasil pekerjaan yang sebenarnya. Sebaliknya, metode persentase penyelesaian memungkinkan perusahaan melaporkan pendapatan, beban, dan laba secara bertahap sesuai dengan perkembangan proyek sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan. Selain mendukung prinsip pencocokan, penerapan PSAK No. 34 juga meningkatkan karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan dan andal. Informasi menjadi relevan karena pendapatan dan laba yang dilaporkan mencerminkan kondisi proyek pada akhir periode pelaporan. Informasi juga menjadi andal karena dasar pengukuran menggunakan biaya yang benar-benar telah terjadi dan dapat dibuktikan melalui dokumen pendukung proyek. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan mampu memberikan informasi yang lebih baik kepada manajemen, kreditur, investor, maupun pihak lain yang berkepentingan.

Penerapan PSAK No. 34 dengan menggunakan metode persentase penyelesaian (*Percentage of Completion Method*) memberikan dampak yang positif terhadap pengakuan pendapatan dan beban proyek pada PT Mandiri Jaya Grup. Dengan metode ini, pendapatan dan beban diakui sesuai dengan tingkat penyelesaian proyek pada setiap akhir periode pelaporan, sehingga laporan keuangan mampu mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Pengakuan pendapatan dilakukan secara bertahap berdasarkan progres pekerjaan yang telah diselesaikan, sedangkan beban proyek diakui sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Penerapan ini menciptakan keseimbangan antara pendapatan dan beban sesuai dengan prinsip pencocokan (*matching principle*), sehingga laba yang dihasilkan setiap periode menjadi lebih wajar dan tidak mengalami fluktuasi yang signifikan. Selain itu, laporan keuangan menjadi lebih relevan, andal, transparan, dan dapat dibandingkan antarperiode, sehingga memudahkan manajemen dalam mengevaluasi kinerja proyek, mengendalikan biaya konstruksi, menyusun perencanaan keuangan, serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan operasional perusahaan.

Dari sisi eksternal, laporan keuangan yang disusun sesuai PSAK No. 34 juga meningkatkan kepercayaan investor, kreditur, dan auditor karena informasi yang disajikan telah menggambarkan kinerja perusahaan secara objektif dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sebaliknya, apabila PT Mandiri Jaya Grup tidak menerapkan PSAK No. 34, maka pengakuan pendapatan dan beban proyek tidak akan mencerminkan tingkat penyelesaian pekerjaan yang sebenarnya. Pendapatan cenderung diakui setelah proyek selesai, sedangkan beban dapat diakui pada saat biaya terjadi, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara pendapatan dan beban pada periode yang sama. Akibatnya, laba perusahaan dapat mengalami fluktuasi yang tinggi, yaitu terlihat rendah atau bahkan rugi selama proyek masih berlangsung karena biaya telah dikeluarkan tetapi pendapatan belum

diakui, kemudian meningkat secara drastis ketika proyek selesai dan seluruh pendapatan diakui sekaligus. Kondisi tersebut menyebabkan laporan keuangan tidak mampu menggambarkan kinerja perusahaan secara wajar, mengurangi kualitas informasi akuntansi, serta menyulitkan manajemen dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan proyek dan mengendalikan biaya. Selain itu, pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditur, maupun pihak lain akan mengalami kesulitan dalam menilai tingkat profitabilitas dan kinerja perusahaan karena informasi yang disajikan tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, penerapan PSAK No. 34 menjadi sangat penting bagi PT Mandiri Jaya Grup agar pengakuan pendapatan dan beban proyek dilakukan secara tepat, sehingga laporan keuangan dapat memberikan informasi yang akurat, konsisten, dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

Pengakuan Pendapatan

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK No. 34 memberikan dampak terhadap besarnya laba yang dilaporkan perusahaan. Karena pendapatan diakui secara bertahap sesuai dengan kemajuan proyek, maka laba yang dihasilkan setiap periode juga mencerminkan hasil pekerjaan pada periode tersebut. Hal ini berbeda dengan metode yang mengakui seluruh pendapatan pada saat proyek selesai, yang menyebabkan laba pada periode pelaksanaan proyek menjadi rendah, sedangkan laba pada saat proyek selesai menjadi sangat tinggi. Kondisi tersebut dapat mengurangi relevansi laporan keuangan karena tidak menggambarkan kinerja perusahaan secara berkesinambungan. Penerapan PSAK No. 34 dengan menggunakan metode persentase penyelesaian (*Percentage of Completion Method*) memberikan dampak yang signifikan terhadap pengakuan pendapatan pada PT Mandiri Jaya Grup. Melalui metode ini, pendapatan diakui secara bertahap sesuai dengan tingkat penyelesaian proyek pada setiap akhir periode akuntansi. Dengan demikian, pendapatan yang disajikan dalam laporan keuangan mencerminkan hasil pekerjaan yang benar-benar telah diselesaikan, bukan berdasarkan jumlah kas yang diterima ataupun ketika proyek telah selesai seluruhnya. Kondisi tersebut menyebabkan laporan laba rugi mampu menggambarkan kinerja perusahaan secara lebih realistis karena setiap periode memperoleh pendapatan yang proporsional terhadap kemajuan pekerjaan. Selain itu, penerapan metode persentase penyelesaian juga meningkatkan kualitas informasi akuntansi karena pendapatan yang diakui telah memenuhi karakteristik relevan, andal, dan dapat dibandingkan antarperiode. Informasi tersebut menjadi dasar yang lebih akurat bagi manajemen dalam mengevaluasi kinerja proyek, menyusun strategi bisnis, mengelola arus kas, serta menentukan estimasi laba yang akan diperoleh pada periode berikutnya. Bagi pihak eksternal seperti investor, kreditur, maupun auditor, laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK No. 34 juga meningkatkan tingkat kepercayaan karena menunjukkan kondisi ekonomi perusahaan yang sesungguhnya.

Sebaliknya, apabila PT Mandiri Jaya Grup tidak menerapkan PSAK No. 34 dan tetap mengakui seluruh pendapatan pada saat proyek selesai (*completed contract method*), maka pendapatan perusahaan akan berfluktuasi secara tajam. Selama proyek berlangsung, perusahaan dapat terlihat tidak memperoleh pendapatan meskipun aktivitas konstruksi telah berjalan dan biaya telah dikeluarkan dalam jumlah besar. Sebaliknya, pada saat proyek selesai perusahaan akan mengakui seluruh pendapatan sekaligus sehingga laba yang dihasilkan menjadi sangat tinggi dalam satu periode. Kondisi tersebut mengakibatkan laporan keuangan tidak mampu mencerminkan kinerja perusahaan yang sebenarnya, menyebabkan informasi keuangan menjadi kurang relevan, serta berpotensi menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam menilai tingkat profitabilitas perusahaan. Selain itu, pengambilan keputusan oleh manajemen maupun investor menjadi kurang tepat karena didasarkan pada informasi yang tidak menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan secara berkesinambungan.

Beban Proyek

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jurnal koreksi yang dilakukan terhadap akun Pekerjaan dalam Pelaksanaan (*Construction in Progress*) memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan. Akun tersebut berfungsi sebagai aset yang mencerminkan akumulasi biaya kontrak selama proyek masih berlangsung. Setelah pekerjaan mencapai tingkat penyelesaian tertentu, sebagian biaya tersebut dipindahkan menjadi beban yang diakui pada laporan laba rugi. Mekanisme tersebut sesuai dengan PSAK No. 34 karena memastikan bahwa biaya yang diakui benar-benar berkaitan dengan pendapatan yang dihasilkan pada periode yang sama. Penerapan PSAK No. 34 juga mencerminkan penerapan prinsip pencocokan (*matching principle*). Dalam prinsip ini, biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, biaya yang telah terjadi setiap tahun selalu digunakan sebagai dasar pengakuan beban pada periode yang sama dengan pengakuan pendapatan berdasarkan persentase penyelesaian. Dengan demikian, laba kotor yang dihasilkan setiap tahun benar-benar mencerminkan hasil kegiatan konstruksi pada periode tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan beban proyek pada PT Mandiri Jaya Grup akan lebih sesuai dengan PSAK No. 34 apabila perusahaan secara konsisten mengakui biaya kontrak berdasarkan biaya yang telah terjadi dan tingkat penyelesaian pekerjaan. Penerapan metode tersebut tidak hanya meningkatkan ketepatan pengukuran laba, tetapi juga menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan, andal, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dengan demikian, perusahaan dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen maupun pihak eksternal.

Penerapan PSAK No. 34 juga memberikan dampak yang sangat penting terhadap pengakuan beban proyek pada PT Mandiri Jaya Grup. Dengan menggunakan metode persentase penyelesaian, setiap biaya yang berkaitan dengan proyek konstruksi diakui sesuai dengan tingkat penyelesaian pekerjaan pada periode berjalan. Hal tersebut menciptakan kesesuaian antara pendapatan yang diakui dengan beban yang dikeluarkan (*matching principle*), sehingga laba yang dihasilkan mencerminkan hasil usaha yang sebenarnya. Beban proyek yang diakui secara proporsional juga memungkinkan perusahaan mengetahui efisiensi pelaksanaan proyek, mengendalikan biaya operasional, serta mengevaluasi penyimpangan antara anggaran dan realisasi biaya. Selain itu, pencatatan pekerjaan dalam pelaksanaan sebagai aset sebelum proyek selesai memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai nilai aset perusahaan pada laporan posisi keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi lebih wajar, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Sebaliknya, apabila perusahaan tidak menerapkan PSAK No. 34, maka terdapat kemungkinan seluruh biaya proyek langsung dibebankan pada periode saat biaya tersebut terjadi tanpa mempertimbangkan tingkat penyelesaian proyek. Kondisi ini akan menyebabkan ketidaksesuaian antara pendapatan dan beban, sehingga laba perusahaan dapat menjadi terlalu rendah bahkan mengalami kerugian pada periode tertentu, meskipun proyek sebenarnya masih berlangsung dan memiliki potensi keuntungan yang besar di masa mendatang. Pada saat proyek selesai, perusahaan justru akan mencatat laba yang sangat besar karena pendapatan baru diakui seluruhnya sementara sebagian besar biaya telah diakui pada periode sebelumnya. Akibatnya, laporan keuangan kehilangan kemampuan dalam menggambarkan efisiensi proyek, menyulitkan manajemen dalam melakukan evaluasi biaya, meningkatkan risiko kesalahan pengambilan keputusan, serta mengurangi kredibilitas laporan keuangan di mata auditor, investor, dan kreditur.

Pajak

Kondisi PT Mandiri Jaya Grup, hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya nilai kontrak pada tahun 2024 menyebabkan meningkatnya pendapatan yang diakui, biaya kontrak yang dikeluarkan, serta kewajiban perpajakan perusahaan. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas operasional perusahaan memiliki pengaruh langsung terhadap besarnya pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, ketepatan dalam mengakui pendapatan dan beban menjadi faktor penting agar perhitungan pajak tidak mengalami kesalahan yang dapat mengakibatkan sanksi administrasi maupun koreksi fiskal pada masa yang akan datang. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa meningkatnya termin pajak, PPN, PPh Pasal 23, dan PPh Final selama periode 2022–2024 dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas proyek konstruksi yang dilaksanakan oleh PT Mandiri Jaya Grup. Penerapan PSAK No. 34 melalui metode persentase penyelesaian membantu perusahaan menyajikan pendapatan dan beban secara lebih proporsional sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi ketentuan standar akuntansi, tetapi juga menjadi dasar yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan secara tepat, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan PSAK No. 34 melalui metode persentase penyelesaian juga memberikan dampak terhadap perhitungan dan pelaporan pajak PT Mandiri Jaya Grup. Pengakuan pendapatan secara bertahap menyebabkan dasar pengenaan pajak menjadi lebih sesuai dengan aktivitas ekonomi yang benar-benar terjadi selama periode berjalan. Dengan demikian, kewajiban perpajakan perusahaan dapat dihitung secara lebih proporsional berdasarkan pendapatan yang telah diakui sesuai tingkat penyelesaian proyek. Kondisi tersebut membantu perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), menjaga stabilitas arus kas karena pembayaran pajak dilakukan secara bertahap, serta mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak. Selain itu, penerapan PSAK No. 34 meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan akuntansi dan perpajakan sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya koreksi fiskal maupun sanksi administrasi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak. Laporan keuangan yang disusun sesuai standar juga memudahkan proses audit karena terdapat kesesuaian antara pengakuan pendapatan, beban, dan kewajiban perpajakan.

Sebaliknya, apabila PT Mandiri Jaya Grup tidak menerapkan PSAK No. 34, maka pengakuan pendapatan yang dilakukan pada saat proyek selesai akan menyebabkan dasar pengenaan pajak menjadi tidak mencerminkan aktivitas ekonomi yang terjadi pada setiap periode. Selama proyek berlangsung, kewajiban pajak dapat terlihat lebih kecil dibandingkan kondisi sebenarnya karena pendapatan belum diakui, sedangkan pada saat proyek selesai perusahaan harus menanggung beban pajak dalam jumlah yang jauh lebih besar. Kondisi tersebut dapat mengganggu likuiditas perusahaan akibat meningkatnya kebutuhan kas untuk memenuhi kewajiban perpajakan dalam satu periode. Selain itu, perbedaan waktu pengakuan pendapatan antara laporan keuangan dan ketentuan perpajakan berpotensi menimbulkan koreksi fiskal, sengketa perpajakan, hingga sanksi administrasi apabila tidak didukung oleh pencatatan yang memadai. Dampak lainnya adalah menurunnya kualitas informasi keuangan karena hubungan antara pendapatan, laba, dan pajak tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya, sehingga dapat memengaruhi penilaian investor, kreditur, maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kinerja PT Mandiri Jaya Grup.

SIMPULAN

Bahwa tingkat penyelesaian proyek pada tahun 2022 sebesar 60,88%, tahun 2023 sebesar 53,00%, dan tahun 2024 sebesar 59,87%. Berdasarkan tingkat penyelesaian tersebut, pendapatan yang diakui masing-masing sebesar Rp10.672.595.441,64, Rp8.748.744.316,80, dan Rp12.257.092.354,76, sedangkan beban proyek yang diakui sebesar Rp6.543.500.000,00,

Rp5.764.000.000,00, dan Rp7.081.650.000,00, sehingga menghasilkan laba kotor masing-masing sebesar Rp4.129.095.441,64, Rp2.984.744.316,80, dan Rp5.175.442.354,76. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan dan beban berdasarkan tingkat penyelesaian proyek dapat mencerminkan kemajuan pekerjaan dan kinerja proyek secara lebih proporsional pada setiap periode. Dari sisi perpajakan, peningkatan termin pajak selama periode 2022–2024 diikuti peningkatan PPN, PPh Pasal 23, dan PPh Final, yaitu PPN dari Rp977.089.273,00 menjadi Rp1.075.279.000,00, PPh Pasal 23 dari Rp195.417.855,00 menjadi Rp215.055.800,00, dan PPh Final dari Rp214.959.640,00 menjadi Rp236.561.380,00. Dengan demikian, penerapan metode persentase penyelesaian berdasarkan PSAK No. 34 membantu PT Mandiri Jaya Grup dalam mengakui pendapatan dan beban sesuai dengan tingkat penyelesaian proyek, sedangkan pengakuan dan perhitungan kewajiban perpajakan tetap harus disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, F. (2023). *Teori Akuntansi* (Vol. 01). Media Sains Indonesia.
- Andaki, M. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2015). Analisis perbandingan pengakuan pendapatan dan pembebanan biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan pada perusahaan jasa konstruksi (Studi pada PT. Anugrah Adyatama, Jakarta). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1), 1193–1202. <https://doi.org/10.35794/emba.3.1.2015.7943>
- Ari, Y. E., Djou, L. D. G., & Reo, H. (2021). Analisis pengakuan pendapatan dan beban pada CV. Putra Tunggal Mandiri Kabupaten Ngada berdasarkan PSAK No. 34. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(1), 1–12.
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2022). *Analisa Laporan Keuangan*.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2021). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 34: Kontrak Konstruksi*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2021). *SAK Entitas Privat. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas*.
- Isroah. (2022). *Pajak (Edisi Revisi)*. Pustaka Baru Press.
- Kalsum, U., Nasaruddin, F., & Timpa, H. (2020). Analisis implementasi PSAK No. 34 pada PT. Bumi Sarana Beton. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 3(2), 131–140.
- Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2022). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK (Edisi Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mohammad Taufik, M. H., & M. M. (2021). *Pengantar Hukum Pajak* (Vol. 5).
- Neneng, A. M., Sardiyo, & Eri, T. (2020). Analisis akuntansi pendapatan kontrak berdasarkan PSAK No. 34 pada PT. Samudra Jaya Lestari. 6(2), 168–178.
- Rachmayani, A. N. (2021). PSAK 34 – Akuntansi Kontrak Konstruksi. 34, 6.
- Rahmi, S. (2021). *Buku Ajar Mengenal Dasar Ilmu Akuntansi*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Rizki, N., Rahayu, S., Wulandari, I., Indradi, D., Merliyana, R. D., Nugraha, E., Wulandari, F. A., Rahmiyanti, S., Fahmi, M., Zaelani, R., Hastuti, W., Kasingku, F. J., Syahrenny, N., & Akmal, D. (2022). *Akuntansi Keuangan Menengah*.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Suhardi, Fitriana, A. V., Indrawati, A., Amrih, M., Sembiring, S., Jannah, L., Budiantara, M., Rifani, R. A., Gaol, R. L., Berry, Y., Diva, S., & Lukman, S. (2023). *Teori Akuntansi*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ummah, M. S. (2022). *Akuntansi Keuangan Menengah 1 (Berbasis IFRS)*. Sustainability (Switzerland), 11(1).